

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan pajak merupakan dua hal penting dalam perspektif kebijakan fiskal. Pada tahun 2013, APBN-P mencapai Rp 1,502 triliun, dengan komposisi 76,25% berasal dari penerimaan pajak. Mengingat besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, maka negara, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Apabila DJP tidak optimal dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak maka negara perlu mencari pembiayaan sumber lain yang memiliki biaya lebih mahal.

Peranan penerimaan pajak dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ada dua hal yang memicu semakin meningkatnya komposisi penerimaan pajak dalam APBN. Pertama, semakin berkurangnya penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi yang menjadi tumpuan pembiayaan pada periode-periode sebelumnya. Kedua, semakin dikurangnya peranan pinjaman luar negeri dalam APBN karena pinjaman luar negeri dianggap kurang konstruktif bagi perekonomian Indonesia.

Mengingat posisi strategis penerimaan pajak, maka akselerasi realisasi peningkatan penerimaan pajak setiap tahun sangat diharapkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendorong

pertumbuhan pendapatan negara dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan, maka pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan fiskal, baik di bidang perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Tujuan utama dari setiap sistem perpajakan dan lembaga pelaksanaannya adalah menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Seberapa besar penerimaan yang dianggap cukup dan harus dihimpun dalam satu tahun sudah ditetapkan dalam UU APBN. Namun, kenyataan yang terjadi dalam praktek terkadang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut artikel di situs <http://bisniskeuangan.kompas.com> hari Senin tanggal 6 Januari 2014 dengan judul “Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp. 1.099 Triliun” menulis bahwa realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2013 mencapai Rp 1.099 triliun atau 95,69% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. Menurut Rahmany (2014), perbaikan ekonomi Indonesia dinilai semakin membaik, sayangnya tidak diimbangi dengan penerimaan pajak dari sektor tradeable yang disebabkan oleh permasalahan infrastruktur.

Penerimaan perpajakan dalam struktur APBN selama ini dirasa masih belum memadai untuk mengakomodir pengeluaran negara yang terus meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya fiscal gap dan defisit anggaran. Untuk mengimbangi peningkatan pengeluaran negara tersebut maka diperlukan peningkatan penerimaan pajak di mana hal ini masih dimungkinkan mengingat angka *tax ratio* Indonesia masih rendah dan di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara berkembang di dunia. Apabila dicermati lebih lanjut, realisasi penerimaan

pajak selama ini belum menunjukkan angka riil yang sebenarnya dapat digali (potensi). Penggalan potensi ini akan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi sehingga memperkecil *fiscal gap*. Untuk itu perlu upaya penyesuaian terhadap metode penentuan target penerimaan pajak. Penyesuaian dimaksud adalah peningkatan kemampuan metode sehingga diperoleh angka potensi riil penerimaan pajak.

Selama ini perencanaan penerimaan pajak dari tahun ketahun dilakukan berdasarkan pendekatan inkremental karena lebih praktis dan pragmatis. Rencana penerimaan pajak suatu tahun (X1) didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya (X0) dengan penyesuaian terhadap beberapa indikator ekonomi makro seperti (1) pertumbuhan ekonomi, (2) suku bunga, (3) nilai tukar/kurs, (4) nilai ekspor-impor, (5) inflasi, (6) harga minyak dan (7) produksi migas (lifting). Agar perkiraan penerimaan pajak menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan hubungan kinerjanya perlu dilakukan penelitian dengan seksama.

Wahyudi, dkk (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perubahan konsumsi minyak, harga minyak, inflasi, uang beredar dan nilai tukar memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Zhang dan Cui (2008) dari Chinese Academy of Sciences China dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan beberapa faktor ekonomi makro di China yaitu nilai ekspor-impor, Produk Domestik Bruto dan harga minyak mentah.

Hamzah dan Wibowo (2005) alumni Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia Jakarta, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai tukar/kurs dan IHSG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan suku bunga Bank Indonesia tidak secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh suku bunga, nilai tukar, inflasi dan nilai impor terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Sutrisno (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada tahun data penelitian serta jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data data tahun 2009-2013 berbeda dengan penelitian Sutrisno (2011) yang menggunakan data tahun 2004-2009. Perbedaan yang lain adalah jumlah variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah empat variabel, sedangkan Sutrisno (2011) menggunakan enam variabel independen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ” **Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Makro Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Indonesia.**”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang terjadi saat ini adalah realisasi penerimaan pajak di Indoneisa beberapa tahun terakhir tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Padahal penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap APBN. Apabila

penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan dikhawatirkan dapat mengganggu pembangunan dan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesias angat diperlukan agar diketahui faktor faktor dominan yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan rencana penerimaan pajak yang lebih kredibel, realistis dan *reliable*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
2. Apakah nilai tukar/kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
3. Apakah inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
4. Apakah nilai impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh suku bunga terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
2. Pengaruh nilai tukar/kurs terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
3. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

4. Pengaruh nilai impor terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- Dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang perencanaan penerimaan perpajakan pada khususnya.

- Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi/peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian pada topik yang sama.

2. Praktisi

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan perencanaan penerimaan pajak di Indonesia.